

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA****(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Maret 2023/Khusus - Awal Menjabat)**

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PANGAN NASIONAL
UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ARIEF PRASETYO ADI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL**
3. NHK : **647935**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 15.905.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
2. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA KOTA BINTAN, WARISAN Rp. 2.650.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BINTAN, WARISAN Rp. 530.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 6.200.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 260 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , WARISAN Rp. 3.550.000.000
6. Tanah Seluas 1600 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, WARISAN Rp. 175.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 232 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.100.000.000
8. Tanah Seluas 30000 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 205.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 105.000.000
2. MOTOR, YAMAHA RX K Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000



3. MOBIL, TOYOTA KIJANG SSX Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp.
55.000.000
4. MOTOR, YAMAHA X RIDE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
5. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
21.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	411.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	3.110.315.561
F. HARTA LAINNYA	Rp.	866.000.000
Sub Total	Rp.	20.497.315.561
III. HUTANG	Rp.	2.148.358.193
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	18.348.957.368

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.